

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah kota metropolitan yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi memiliki sebutan sebagai “Kota Patriot” karena patriotisme masyarakat Kota Bekasi teruji melalui perang besar yang pernah terjadi di kota ini pada tahun 1945 (Rym, 2022). Letak Kota Bekasi berada di dekat DKI Jakarta yang menjadikannya sebagai kota satelit dan bagian kawasan pengembangan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Dengan perkembangan yang pesat, Kota Bekasi menjadi kawasan tempat tinggal bagi kaum urban dan sentra industri. 10 Maret 1996 merupakan hari jadi Kota Bekasi. Kemendagri meresmikan pembentukan daerah tingkat II Bekasi yang dilaksanakan di Stadion Bekasi yang sekarang menjadi Stadion Patriot Candrabhaga (Purwanto, 2021).

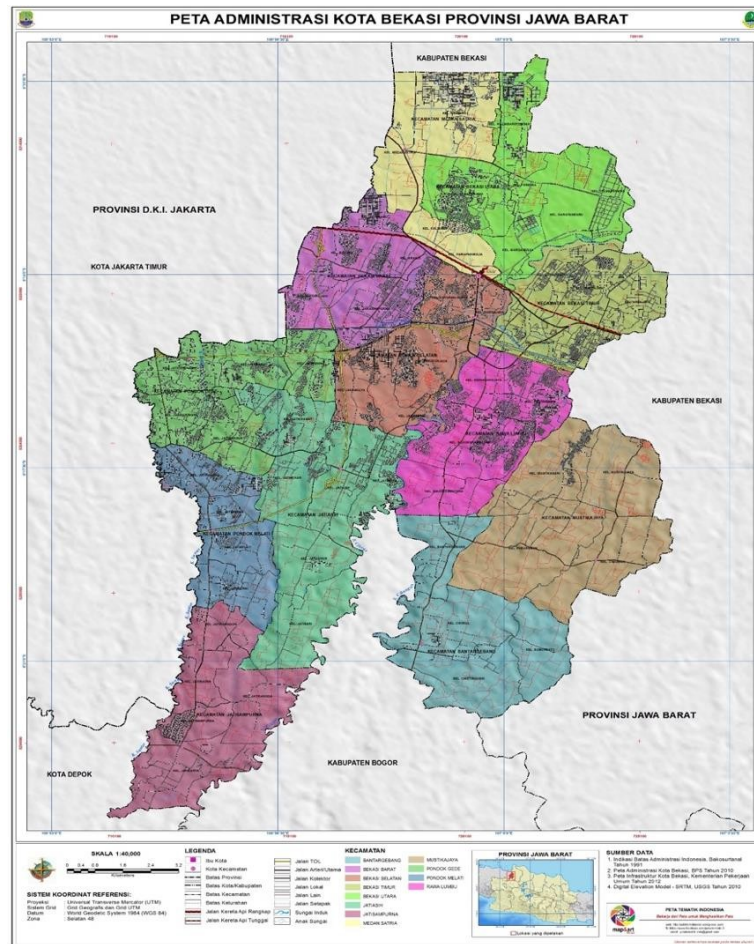
2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Bekasi memiliki posisi astronomis yang strategis, terbentang antara 106°48'28" hingga 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" hingga 6°30'6" Lintang Selatan. Letak geografis ini memberikan Kota Bekasi karakteristik iklim tropis yang khas, dengan suhu rata-rata yang cenderung hangat sepanjang tahun.

Topografi Kota Bekasi didominasi oleh dataran rendah yang relatif datar, dengan kemiringan lahan yang sangat landai, berkisar antara 0 hingga 2 persen. Elevasi wilayah ini bervariasi mulai dari 28 meter hingga 110

meter di atas permukaan laut, menciptakan lanskap perkotaan yang ideal untuk pengembangan infrastruktur dan pemukiman.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Dengan luas total mencapai 213,12 km², Kota Bekasi menawarkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan urban yang pesat. Wilayah administratif kota ini, per tahun 2023, terbagi menjadi 12 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik dan luas yang beragam. Mustikajaya merupakan kecamatan terluas mencakup area 24,76 km², diikuti oleh Jatiasih seluas 24,26 km². Bekasi Utara memiliki luas 20,81 km², Jatisampurna 20,19 km², dan Bantargebang 19,24 km². Pondokgede

membentang seluas 17,43 km², Rawalumbu 16,85 km², dan Bekasi Selatan 15,81 km². Bekasi Barat mencakup area 14,9 km², sedangkan Bekasi Timur 14,64 km². Medansatria memiliki luas 13,21 km², dan Pondokmelati menjadi kecamatan terkecil dengan luas 11,02 km² (BPS Kota Bekasi, 2024). Berikut merupakan tabel luas wilayah di Kota Bekasi pada tahun 2023.

Tabel 2.1 Luas Wilayah di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Pondokgede	17,43 km ²
2.	Jatisampurna	20,19 km ²
3.	Pondokmelati	11,02 km ²
4.	Jatiasih	24,26 km ²
5.	Bantargebang	19,24 km ²
6.	Mustikajaya	24,76 km ²
7.	Bekasi Timur	14,64 km ²
8.	Rawalumbu	16,85 km ²
9.	Bekasi Selatan	15,81 km ²
10.	Bekasi Barat	14,9 km ²
11.	Medansatria	13,21 km ²
12.	Bekasi Utara	20,81 km ²
Total		213,12 km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Kota Bekasi berbatasan dengan beberapa wilayah penting, yang membentuk dinamika sosial-ekonomi kota ini. Di sebelah utara dan timur, Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi yang kaya akan lahan pertanian dan kawasan industri. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor yang terkenal dengan potensi wisata alam dan agrikulturnya. Sementara itu, di sebelah barat, Kota Bekasi langsung bersinggungan dengan Provinsi DKI Jakarta, pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, populasi Kota Bekasi pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,63 juta jiwa. Berikut merupakan tabel pembagian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi Tahun pada 2023.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
1.	Pondokgede	254,11	0,44%
2.	Jatisampurna	131,29	2,00%
3.	Pondokmelati	132,56	0,42%
4.	Jatiasih	265,30	2,42%
5.	Bantargebang	111,44	1,35%
6.	Mustikajaya	233,68	3,11%
7.	Bekasi Timur	261,48	0,63%
8.	Rawalumbu	225,79	0,82%
9.	Bekasi Selatan	214,22	0,60%
10.	Bekasi Barat	286,11	0,58%
11.	Medansatria	163,38	0,32%
12.	Bekasi Utara	347,84	1,12%
Total		2.627,21	1,15%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Utara sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 347,84 ribu jiwa, mewakili 13,24 persen dari total populasi kota. Bekasi Barat dan Jatiasih menempati posisi kedua dan ketiga, masing-masing dengan 286,11 ribu jiwa dan 265,30 ribu jiwa. Bekasi Timur dengan 261,48 ribu penduduk dan Pondokgede menampung 254,11 ribu penduduk. Lalu Mustikajaya dengan 233,68 ribu penduduk, Rawalumbu dengan 225,79 ribu penduduk dan Bekasi Selatan yang dihuni 214,22 ribu jiwa. Sementara itu, beberapa

kecamatan memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah, seperti Medansatria dengan 163,38 ribu penduduk, Pondokmelati dengan 132,56 ribu penduduk, dan Jatisampurna dengan 131,29 ribu penduduk. Bantargebang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yakni 111,44 ribu jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang menarik di antara 12 kecamatan. Berikut merupakan tabel Kepadatan penduduk di Kota Bekasi Tahun pada 2023.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ² (Ribu)
1.	Pondokgede	9,67%	15
2.	Jatisampurna	5,00%	7
3.	Pondokmelati	5,05%	12
4.	Jatiasih	10,10%	11
5.	Bantargebang	4,24%	6
6.	Mustikajaya	8,89%	9
7.	Bekasi Timur	9,95%	18
8.	Rawalumbu	8,59%	13
9.	Bekasi Selatan	8,15%	14
10.	Bekasi Barat	10,89%	19
11.	Medansatria	6,22%	12
12.	Bekasi Utara	13,24%	17
Total		100,00%	12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa Bekasi Barat mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi dengan 19 ribu jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Bekasi Timur dengan 18 ribu jiwa, dan Bekasi Utara dengan 17 ribu jiwa per km². Pondokgede juga termasuk wilayah yang padat dengan 15 ribu jiwa per km². Bekasi Selatan dan Rawalumbu memiliki tingkat kepadatan

menengah, masing-masing 14 ribu dan 13 ribu jiwa per km². Sementara itu, Medansatria dan Pondokmelati sama-sama memiliki kepadatan 12 ribu jiwa per km², sedangkan Jatiasih mencatat 11 ribu jiwa per km². Wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Jatisampurna dengan 7 ribu jiwa dan Bantargebang dengan 6 ribu jiwa per km². Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk Kota Bekasi mencapai 12 ribu jiwa per km².

Komposisi penduduk terdiri dari 1,32 juta jiwa laki-laki dan 1,31 juta jiwa perempuan, mencerminkan distribusi gender yang relatif seimbang. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kota Bekasi tercatat sebesar 101,08, menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kota Bekasi Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Pondokgede	100,71
2.	Jatisampurna	101,21
3.	Pondokmelati	101,32
4.	Jatiasih	100,39
5.	Bantargebang	103,01
6.	Mustikajaya	102,71
7.	Bekasi Timur	99,22
8.	Rawalumbu	101,44
9.	Bekasi Selatan	99,17
10.	Bekasi Barat	99,92
11.	Medansatria	103,5
12.	Bekasi Utara	102,27
Total		101,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Tabel 2.4 menunjukkan total rasio jenis kelamin di Kota Bekasi adalah 101,08, yang berarti secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan Medansatria memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 103,5, diikuti oleh Kecamatan Bantargebang (103,01) dan Mustikajaya (102,71). Sementara itu, rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan dengan nilai 99,17, diikuti oleh Bekasi Timur (99,22) dan Bekasi Barat (99,92). Hal ini menunjukkan bahwa di tiga kecamatan tersebut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Dari 12 kecamatan yang ada, 9 kecamatan memiliki rasio jenis kelamin di atas 100, yang mengindikasikan bahwa di sebagian besar wilayah Kota Bekasi, populasi laki-laki lebih dominan dibandingkan populasi perempuan.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kota Bekasi, salah satu kota penting di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif dan dinamis pada periode 2021 – 2023. Berikut merupakan tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Bekasi Tahun pada 2021 – 2023.

Tabel 2.5 PDRB Harga Berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Bekasi Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Ekonomi	Satuan	2021	2022	2023
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Triliun rupiah	101,38	109,88	118,96
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,22	4,96	5,43
3.	Inflasi	%	1,61	5,37	3,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan tabel 2.5, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 – 2023. Pada tahun 2021, PDRB Kota Bekasi mencapai 101,38 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 109,88 triliun rupiah pada tahun 2022, dan terus bertumbuh hingga mencapai 118,96 triliun rupiah pada tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,22%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,96% pada tahun 2022, dan semakin meningkat mencapai 5,43% pada tahun 2023. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bekasi semakin membaik dan pulih, terutama setelah masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, tingkat inflasi di Kota Bekasi menunjukkan fluktuasi yang cukup menarik. Pada tahun 2021, inflasi tercatat relatif rendah yaitu sebesar 1,61%. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dimana inflasi mencapai 5,37%, yang kemudian berhasil ditekan kembali menjadi 3,14% pada tahun 2023. Fluktuasi inflasi ini mencerminkan dinamika ekonomi yang terjadi, dimana tekanan harga sempat meningkat cukup tajam pada tahun 2022 namun berhasil dikendalikan pada tahun berikutnya.

Meski selalu terjadi peningkatan dalam hal perekonomian, Kota Bekasi menduduki posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin di antara kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi sebesar 134,0 ribu jiwa, tahun 2021 sebesar 144,1

ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 137,4 ribu jiwa dan di tahun 2023 sebesar 129,4 ribu jiwa.

Tabel 2.6 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bekasi Tahun 2020 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	657.953	134,01	4,38%
2021	692.885	144,1	4,74%
2022	731.329	137,39	4,43%
2023	795.965	129,4	4,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Jika dikaitkan dengan data pengeluaran per kapita penduduk Kota Bekasi tahun 2023, terlihat bahwa data distribusi pengeluaran per kapita, dimana terdapat 7,38% penduduk (total dari kelompok dengan pengeluaran Rp.300.000-Rp.499.999 sebesar 1,48% dan kelompok Rp.500.000-Rp.749.999 sebesar 5,90%) yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan yakni sebesar Rp.795.965. Berikut merupakan tabelnya.

Tabel 2.7 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah)	Persentase Penduduk
1.	< 150.000	0
2.	150.000 – 199.999	0
3.	200.000 – 299.999	0
4.	300.000 – 499.999	1,48
5.	500.000 – 749.999	5,90
6.	750.000 – 999.999	10,13
7.	1.000.000 – 1.499.999	20,38
8.	> 1.500.000	62,11
Total		100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup kontras, dimana di satu sisi mayoritas penduduk (92,62%) memiliki pengeluaran di

atas Rp.750.000 per bulan dengan dominasi 62,11% penduduk yang mampu membelanjakan lebih dari Rp.1.500.000 per bulan, namun di sisi lain masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Situasi ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi di Kota Bekasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi tahun 2023, status ketenagakerjaan penduduk di Kota Bekasi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama yakni Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Berikut merupakan tabel jumlah kelurahan di Kota Bekasi Tahun pada 2023.

Tabel 2.8 Status Ketenagakerjaan Penduduk di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Kegiatan Utama	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	1.138.330
	a. Bekerja	1.124.160
	b. Pengangguran	104.170
2.	Bukan Angkatan Kerja	720.966
	a. Sekolah	169.465
	b. Mengurus Rumah Tangga	432.557
	c. Lainnya	118.944
Total		2.039.296

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Total populasi yang tercatat dalam tabel 2.8 adalah 2.039.296 jiwa. Dari jumlah tersebut, Angkatan Kerja mencapai 1.138.330 orang, yang terdiri dari 1.124.160 orang berstatus bekerja dan 104.170 orang dalam status pengangguran. Sementara itu, kelompok Bukan Angkatan Kerja berjumlah 720.966 orang, yang terbagi dalam tiga kategori yakni 169.465 orang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa sekolah, 432.557 orang

mengurus rumah tangga, dan 118.944 orang dengan kegiatan lainnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bekasi termasuk dalam angkatan kerja dan dari jumlah tersebut, mayoritas sudah bekerja.

Namun, masih terdapat angka pengangguran yang cukup signifikan karena sekitar 9,15% dari total angkatan kerja masih belum mendapat pekerjaan. Angka ini cukup besar mengingat Kota Bekasi merupakan kota satelit Jakarta yang memiliki banyak kawasan industri dan pusat bisnis. Selain itu, mengacu pada data kemiskinan sebelumnya bahwa terdapat 129.400 jiwa penduduk miskin tahun 2023, dengan angka pengangguran yang mencapai 104.170 orang bisa menjadi salah satu faktor terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bekasi. Pengangguran ini juga dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarga yang anggotanya menganggur, terutama di tengah tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan.

Mengenai status pekerjaan utama di Kota Bekasi Tahun 2023, didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yang mencapai 758.323 orang. Berikut tabel Status Pekerjaan Utama di Kota Bekasi Tahun 2023.

Tabel 2.9 Status Pekerjaan Utama di Kota Bekasi Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
Berusaha sendiri	244.501	20,14
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	72.671	5,99
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	48.801	4,02
Buruh/karyawan/pegawai	758.323	62,48
Pekerja bebas	35.089	2,89
Pekerja keluarga/tidak dibayar	54.775	4,51
Total	1.214.160	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan data dari tabel 2.9 menggambarkan dinamika ekonomi perkotaan yang menarik melalui struktur mata pencahariannya. Besarnya kategori “Buruh/Karyawan/Pegawai” yang mencapai 758.323 orang, atau sekitar 62,5%, menunjukkan Kota Bekasi sebagai kota industri dan perkantoran yang kuat, dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor formal dengan status sebagai tenaga kerja yang menerima upah tetap.

Kelompok kedua terbesar yakni mereka yang berusaha sendiri, mencapai 20,14% atau 244.501 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki ekosistem wirausaha yang cukup dinamis, dengan sejumlah besar penduduk memilih untuk membuka usaha mandiri. Sisanya tersebar pada kategori lain yang relatif lebih kecil. Sebanyak 5,99% berusaha dibantu buruh tidak tetap, 4,51% merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar, 4,02% berusaha dengan dibantu buruh tetap, dan 2,89% adalah pekerja bebas. Komposisi ini menggambarkan keberagaman struktur ekonomi di Kota Bekasi, yang mencerminkan kombinasi antara sektor formal, informal dan wirausaha.

2.1.4 Kondisi Pemerintahan

Kota Bekasi dipimpin oleh Wali Kota yang saat ini dijabat oleh Raden Gani Muhamad, SH., MAP. Wali Kota dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta berbagai dinas dan badan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan. Dinas-dinas tersebut mencakup Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan

Umum, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor-sektor strategis di kota ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi juga berperan aktif dalam pembuatan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki visi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. (Bekasikota.go.id).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik kota Bekasi Tahun 2024, bahwa Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan, dan pada tahun 2023, terdapat 56 kelurahan di Kota Bekasi. Berikut merupakan tabel jumlah kelurahan di Kota Bekasi Tahun pada 2023.

Tabel 2.10 Jumlah Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Pondokgede	5
2.	Jatisampurna	5
3.	Pondokmelati	4
4.	Jatiasih	6
5.	Bantargebang	4
6.	Mustikajaya	4
7.	Bekasi Timur	4
8.	Rawalumbu	4
9.	Bekasi Selatan	5
10.	Bekasi Barat	5
11.	Medansatria	4
12.	Bekasi Utara	6
Total		56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Kecamatan Bekasi Utara dan Jatiasih memiliki jumlah kelurahan terbanyak, masing-masing memiliki 6 kelurahan. Kemudian diikuti oleh lima kecamatan yang masing-masing memiliki 5 kelurahan, yaitu Pondokgede, Jatisampurna, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat. Sementara

itu, enam kecamatan lainnya yaitu Pondokmelati, Bantargebang, Mustikajaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Medansatria masing-masing memiliki 4 kelurahan.

Sedangkan untuk jumlah DPRD di Kota Bekasi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 50 orang yang berasal dari 8 partai politik, dengan dominasi anggota laki-laki sebanyak 41 orang (82%) dibandingkan anggota perempuan yang hanya 9 orang (18%). Berikut merupakan tabel jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2023.

Tabel 2.11 Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10	2	12
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	1	8
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10	2	12
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	2	6
5.	Partai Demokrat	4	0	4
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	0	1
8.	Partai Amanat Nasional	3	2	5
Total		41	9	50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

Selanjutnya, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi mengalami penurunan dari 9.302 orang pada 2022 menjadi 8.756 orang pada 2023. Jabatan Fungsional Guru mendominasi dengan 3.448 orang pada

2023, diikuti oleh Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sebanyak 2.512 orang. Beberapa posisi seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, Eselon V, dan Jabatan Fungsional Dosen tidak terisi (0) selama dua tahun berturut-turut. Terjadi penurunan signifikan pada Jabatan Fungsional Medis dari 1.222 menjadi 1.067 orang, sementara Jabatan Fungsional Teknis justru mengalami peningkatan dari 760 menjadi 944 orang. Berikut merupakan tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi Tahun pada 2022 dan 2023.

Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Partai Politik	2022	2023
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0
3.	Jabatan Tinggi Pratama	31	36
4.	Administrator	182	179
5.	Pengawas	575	570
6.	Eselon V	0	0
7.	Jabatan Fungsional Dosen	0	0
8.	Jabatan Fungsional Guru	3.612	3.448
9.	Jabatan Fungsional Medis	1.222	1.067
10.	Jabatan Fungsional Teknis	760	944
11.	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	2.920	2.512
Total		9.302	8.756

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024.

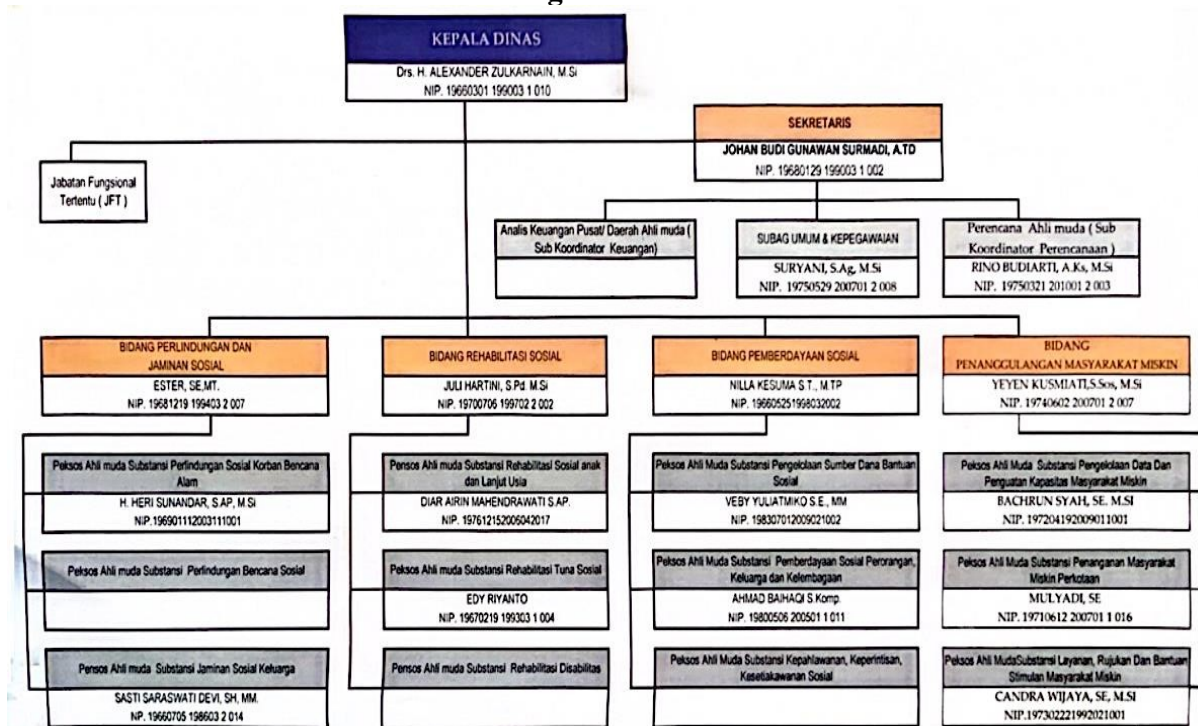
2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bekasi

Dinas Sosial Kota Bekasi dibentuk seiring dengan berdirinya Kota Bekasi sebagai kota otonom pada tahun 1996. Awalnya, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masih tergabung dalam Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan kota dan kompleksitas permasalahan sosial, pada

tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, dibentuklah Dinas Sosial sebagai dinas yang berdiri sendiri. Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Visi yang sama dengan Pemerintah Pusat Kota Bekasi yakni dengan Visi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. (Dinas Sosial, 2023).

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 bahwa Dinas Sosial termasuk ke dalam pelaksana Program Sembako di Kota Bekasi. Dinas Sosial Kota Bekasi berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, bank/pos penyalur, pendamping sosial serta pihak kecamatan atau kelurahan di Kota Bekasi. Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi



Sumber: LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan Gambar 2.2 bahwa Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki empat bidang utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan

berbagai program dan layanan sosial bagi masyarakat di Kota Bekasi. Empat bidang tersebut antara lain, Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Rehabilitas Sosial. Dari keempat bidang tersebut, Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin memiliki tanggung jawab khusus dalam melaksanakan Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023.

Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin, bertanggung jawab meliputi pengawasan dan koordinasi pengembangan kebijakan teknis dan pengurusan pemerintahan, termasuk pengelolaan data, peningkatan kapasitas masyarakat miskin perkotaan, dan memberikan pelayanan, rujukan, dan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin. Dalam rangka kebutuhan pangan bagi sembako Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bekasi, Program Sembako merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat yang dikelola oleh Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin.

2.3 Gambaran Umum Program Sembako di Kota Bekasi

Program bantuan pangan di Kota Bekasi telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2017. Pada awalnya, program ini dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan cara pemerintah untuk memperbarui sistem bantuan sosial dan distribusi bantuan pangan menjadi lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini memanfaatkan sistem kartu elektronik yang memungkinkan penerima untuk membeli bahan makanan di e-warong yang telah ditunjuk sebagai agen (TNP2K.go.id, 2017). Berikut merupakan tabel Perkembangan Program Sembako di Kota Bekasi.

Tabel 2.13 Perkembangan Program Sembako di Kota Bekasi

Tahun	Nama Program	Nilai Bantuan
2017 – 2019	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Rp.110.000
2020	Program Sembako	Rp.150.000
2021 – 2022	Program Sembako	Rp.200.000
2023	Program Sembako	Rp.200.000

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Pada tahun 2017 hingga 2019, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan sosial di Kota Bekasi. Dalam periode ini, program ini masih bernama BPNT, dan penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem perbankan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan bantuan sebesar Rp. 110.000 per bulan. KPM dapat menggunakan kartu KKS tersebut untuk berbelanja dan menukarkan bahan pangan di e-warong (elektronik warung) yang telah ditunjuk sebagai agen penyalur program BPNT. (Kemensos.go.id, 2019).

Memasuki tahun 2020, BPNT mengalami transformasi menjadi Program Sembako. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan memperluas jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Nilai bantuan ditingkatkan menjadi Rp. 150.000 per KPM per bulan. Jenis bantuan juga diperluas, tidak hanya mencakup beras dan telur, tetapi juga bahan pangan bergizi lainnya seperti sayuran dan daging. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa KPM mendapatkan akses ke makanan yang lebih beragam dan bergizi (TNP2K.go.id, 2020).

Selama tahun 2021 hingga 2022, Program Sembako berperan strategis sebagai perlindungan sosial dan menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat yang

membutuhkan. Dalam periode ini, nilai bantuan kembali ditingkatkan menjadi Rp. 200.000 per KPM per bulan. Program ini menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi, memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap bahan pangan yang diperlukan. Di tahun 2022, menjadi tahun terakhir dengan sistem e-warong (elektronik warung) yang digunakan dalam program sembako.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tidak lagi berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023. Dalam peraturan terbaru ini, terdapat perubahan terhadap proses penyaluran. Mulai tahun 2023 sistem e-warong sudah tidak lagi digunakan dalam Program Sembako.

Tabel 2.14 Perbandingan Program Sembako antara Permensos No. 5 Tahun 2021 dengan Permensos No. 4 Tahun 2023

Permensos No 5 Tahun 2021	Permensos No 4 Tahun 2023
Pasal 22: (1) Pembelian barang merupakan pembelian bahan pangan yang dilaksanakan KPM setelah menerima bantuan. (2) Dana bantuan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Pasal 26: (1) Pembelian bahan pangan oleh KPM di e-warong menggunakan dana rekening <i>e-wallet</i> atau dikenal sebagai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). (2) Pembelian bahan pangan oleh KPM dilaksanakan setelah mendapat pemberitahuan dari Bank Penyalur.	Pasal 12: (1) Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dilaksanakan oleh KPM setelah menerima bantuan. (2) Penarikan uang dilakukan oleh KPM di kantor bank penyalur atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (3) Pembelian bahan pangan dilakukan oleh KPM di toko yang menjual bahan pangan. Pasal 18: Penarikan yang dilakukan oleh pos penyalur dengan cara 1. Pengantaran langsung ke alamat KPM 2. Pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur

Sumber: Permensos Nomor 5 Tahun 2021, Permensos Nomor 4 Tahun 2023. Diolah peneliti.